

PRESIDENSI G-20 TAHUN 2022 DAN DAMPAKNYA BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

19

Niken Paramita Purwanto

Abstrak

Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G-20) di Roma, Italia. Agenda pembahasan meliputi ekonomi, kesehatan global, perubahan iklim dan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga secara resmi meneruskan estafet Presidensi G-20 dari Italia. Tulisan ini mengkaji potensi dampak dari Indonesia sebagai Presidensi G-20 bagi perekonomian domestik dan kesiapan pemerintah dalam menginisiasi program prioritas yang bermanfaat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dunia, terutama Indonesia. Manfaat yang didapatkan Indonesia dengan Presidensi G-20 dari aspek ekonomi adalah terbukanya peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat mencapai Rp1,7 triliun, penambahan PDB yang diperkirakan mencapai Rp7,47 triliun, dan pelibatan sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri pada masa mendatang. Ini mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi yang mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Terkait hal ini, DPR perlu memerhatikan agar alokasi anggaran rangkaian pertemuan pelaksanaan KTT G-20 tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan riil dan mengantisipasi ketidakpastian perekonomian akibat Covid-19.

Pendahuluan

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G-20) yang berlangsung 30-31 Oktober 2021 di Roma, Italia yang dihadiri oleh Indonesia baru saja berakhir. Ada beberapa hal yang disampaikan Indonesia pada pertemuan KTT G-20, yaitu ekonomi, kesehatan global, perubahan iklim dan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Indonesia akan menjadi Presidensi G-20 dari Italia tahun 2022 mendatang yang dimulai pada 1 Desember 2021. Ini merupakan

kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G-20 sejak dibentuknya G-20 pada tahun 1999. Selama masa Presidensi, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G-20.

G-20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. G-20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G-20 adalah mewujudkan pertumbuhan



global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G-20 adalah forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang memiliki produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia. Kiprah lembaga ini telah terbukti strategis dan menjadi acuan dalam penentuan arah kebijakan ekonomi dunia, termasuk oleh lembaga global seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Keanggotaan G-20 adalah sembilan negara maju dan Uni Eropa, serta 10 negara yang perekonomiannya tengah bertumbuh (*emerging*). Anggota G-20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Meskipun tidak melibatkan banyak negara, kerja lembaga ini diakui representatif karena mewakili lebih dari 85% kekuatan ekonomi dunia dan 66% jumlah penduduk dunia.

Sejarah telah membuktikan kehadiran G-20 mampu membawa dunia keluar dari tekanan depresi ekonomi saat krisis keuangan global 2007 dan 2008. G-20 juga melakukan inisiatif dalam penanganan pandemi, mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (*Riyadh Declaration*), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, *hand sanitizer*, desinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Selain itu, G-20 berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016, diterapkan prinsip-prinsip kolektif terkait investasi internasional. G-20 juga mendukung gerakan politik yang kemudian berujung pada *Paris Agreement on Climate Change* pada tahun 2015, dan *The 2030*

Agenda for Sustainable Development. Tulisan ini mengkaji dampak dari Indonesia sebagai Presidensi G-20 bagi perekonomian domestik.

Pembahasan G-20 Tahun 2021 di Roma, Italia

Hasil pembahasan G-20 di Italia yaitu meminta para pemimpin G-20 segera mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. G-20 juga perlu menjadi katalis menuju normalisasi kebijakan ekonomi setelah selama dua tahun dunia menjalankan kebijakan *extraordinary* di bidang fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Sementara Presiden Joko Widodo menyampaikan pada sesi KTT G-20, di La Nuvola, Roma, bahwa G-20 harus menjadi katalis bagi dukungan likuiditas dan restrukturisasi utang bagi negara miskin. Selain itu, reaktivasi konektivitas global, khususnya sektor yang mengandalkan pergerakan manusia dan barang seperti pariwisata dan manufaktur. Kerja sama inovasi, teknologi digital, dan teknologi hijau, serta peningkatan investasi bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, serta dukungan kemitraan global bagi pembangunan negara berkembang (*Media Indonesia*, 31 Oktober 2021).

Presiden Jokowi juga menegaskan selain pemulihan ekonomi, semua negara diminta untuk memperkuat arsitektur kesehatan global, berkaca dari munculnya pandemi Covid-19. Penguatan sektor kesehatan penting demi membangun dunia yang tahan terhadap berbagai potensi krisis kesehatan ke depan. Penguatan daya tahan kesehatan global itu juga harus inklusif. Prinsip solidaritas, keadilan, hingga kesetaraan juga harus menjadi pegangan untuk menghindari

munculnya kesenjangan baru sehingga untuk mewujudkannya perlu menyusun mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan secara global dan G-20 harus menjadi bagian penting dari solusi untuk mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan esensial.

Indonesia Sebagai Presidensi G-20 Tahun 2022

Presidensi G-20 Indonesia secara resmi akan dimulai sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 dengan tema utama adalah “*Recover Together, Recover Stronger*”. Melalui tema ini Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia bukan hanya berkesempatan ikut mendorong pencapaian ekonomi global yang lebih produktif dan seimbang dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan moneter yang lebih kuat, tetapi tak kalah penting adalah bagaimana Indonesia dapat berperan aktif memastikan pertumbuhan inklusif yang mengedepankan kesetaraan (*Bisnis Indonesia*, 30 Oktober 2021). Tidak semua negara memiliki kesempatan memimpin G-20. Sebagai presidensi G-20, tentu ini menjadi momentum sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menginisiasi program prioritas yang bermanfaat mendongkrak percepatan pemulihan ekonomi dunia, terutama di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan G-20 memiliki peran yang sangat strategis dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan. G-20 merupakan forum internasional yang sangat strategis. Selain karena keanggotaannya terdiri dari kombinasi negara maju dan

berkembang, secara keseluruhan negara-negara G-20 merupakan 66% populasi dunia yang menguasai 85% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Prakarsa global G-20 secara nyata diwujudkan dalam menangani tantangan global, antara lain penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional, dan penguatan *Global Partnership* (bisnis.com, 15 September 2021).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, maka Presidensi Indonesia akan mengangkat sejumlah agenda prioritas di sektor keuangan. Agenda *pertama* adalah bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju. *Kedua*, bagaimana membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. *Ketiga*, prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (*Central Bank Digital Currency*). *Keempat*, bagaimana memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah, dan aman. *Kelima*, bagaimana mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (*sustainable finance*), termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. *Keenam*, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. *Ketujuh*, bagaimana mengembangkan sistem perpajakan internasional yang

dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pada era digital (media indonesia.com, 15 September 2021).

Untuk mencapai tujuannya, forum G-20 melakukan pertemuan berjenjang dalam dua jalur, yaitu *Finance Track* (Sektor Keuangan) dan *Sherpa Track* (Sektor Sherpa). Jalur Keuangan yang dikoordinasikan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral anggota G-20 akan fokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter dan keuangan. Pembahasan Sektor Keuangan dilakukan dari tingkat Kelompok Kerja (*Working Group*), hingga tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Sektor Sherpa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri akan fokus pada pembahasan area kerja sama non-keuangan, antara lain pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, anti korupsi, perdagangan-investasi-industri, pariwisata, dan pemberdayaan perempuan. Dalam Sektor Sherpa terdapat 11 Kelompok Kerja (*Working Group*) dan 1 kelompok inisiatif yang diampu berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pertemuan non-pemerintah atau *engagement group*.

Manfaat Presidensi G-20 bagi Indonesia

Presidensi G-20 Indonesia diharapkan dapat berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi domestik, melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional. Kehadiran para delegasi berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung terhadap sektor jasa;

perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada setidaknya tiga manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia kala ditunjuk memegang Presidensi G-20 dari aspek ekonomi, yakni (1) Terbukanya peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat mencapai Rp1,7 triliun; (2) Penambahan PDB yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp7,47 triliun; dan (3) Pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri di masa mendatang. Hal ini akan mendorong tumbuhnya keyakinan dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi yang mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan perekonomian (bisnis.com, 5 September 2021).

Presidensi G-20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Ini merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.

Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G-20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah

internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G-20.

Membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (*showcasing*) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertemuan-pertemuan G-20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional termasuk produk UKM, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

Penutup

Pemerintah telah membentuk Panitia Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Kapanitaaan Nasional Penyelenggaraan Presidensi G-20 Indonesia dan telah melakukan persiapan logistik dan infrastruktur untuk bersiap menerima tamu dunia dan memastikan kesuksesan penyelenggaraan pertemuan G-20 selama setahun mendatang. Semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tersebut dipastikan aman dari ancaman penyebaran wabah global Covid-19. Pemerintah saat ini telah menyiapkan sistem aplikasi yang dipergunakan dalam mengantisipasi penyebaran wabah tersebut ketika penyelenggaraan G-20 berlangsung di tanah air dalam beberapa waktu ke depan.

Pemerintah dan seluruh masyarakat perlu bekerja sama agar penyelenggaraan pertemuan G-20 tahun 2022 dapat berjalan efektif dan pemulihan ekonomi nasional dapat diakselerasi dan secara tidak langsung memengaruhi persepsi investor dan pelaku ekonomi terhadap Indonesia serta aman dari ancaman penyebaran wabah global Covid-19. Oleh karena itu, DPR perlu memastikan agar Presidensi G-20 tahun 2022 oleh pemerintah dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR juga perlu memerhatikan agar alokasi anggaran pelaksanaan KTT G-20 tahun 2022 mendatang sesuai dengan kebutuhan riil dan mengantisipasi ketidakpastian perekonomian akibat Covid-19.

Referensi

- "G-20 Sejarah Tujuan dan Peran Indonesia", 20 April 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/27/060000669/G-20-sejarah-tujuan-dan-peran-indonesia>, diakses 2 November 2021.
- "Indonesia Ajak Dunia Berkolaborasi untuk Pulih Bersama di Presidensi G-20 2022, 16 September 2021, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2934/berita/indonesia-ajak-dunia-berkolaborasi-untuk-pulih-bersama-di-presidensi-g-20-2022> diakses 2 November 2021.
- "Menakar Peran Indonesia Sebagai Presidensi G-20", *Bisnis Indonesia*, 30 Oktober 2021, hal. 2.
- "Percepat Pemulihan Ekonomi Global yang Inklusif", *Media Indonesia*, 31 Oktober 2021, hal. 1.
- "Presidensi G-20 Indonesia 2022", 2 November 2021, <https://www.bi.go.id/id/G-20/Default.aspx>,

diakses 2 November 2021
"Presidensi G-20 Ini Manfaatnya bagi Indonesia", 15 September 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210915/9/1442427/presidensi-G-20-ini-manfaatnya-bagi-perekonomian-nasional>, diakses 2 November 2021.

"Tata Ulang Arsitektur Kesehatan Global", *Kompas*, 31 Oktober 2021, hal. 1.



Niken Paramita Purwanto
niken.purwanto@dpr.go.id.

Niken Paramita Purwanto, Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI, dengan kepakaran bidang Kebijakan Publik. Lahir di Jakarta, pada 25 Juni 1977, menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Universitas Trisakti, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Indonesia.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.